

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di saat sekarang ini bersamaan dengan reformasi dari sistem politik ke arah yang lebih demokratis di semua lapisan pemerintahan, maka berkembang pula paradigma *good governance*. *Good governance* merupakan sebuah tata pemerintahan yang baik, dalam artian hubungan antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai kualitas hubungan yang terjalin baik untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Penerapan prinsip *good governance* sangat penting dijalankan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabelitas, dan partisipasi. Untuk mencapai itu semua harus adanya kerjasama antara pemerintah (*state*), masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*) karena tiga aktor utama tersebut sangat penting bagi penerapan *good governance* dalam suatu tataran pemerintahan. Tugas utama dari ketiga aktor tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Dari pemerintah memegang peran penting dalam menegakkan hukum, keadilan, serta membangun politik yang lebih kondusif ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan peran masyarakat dalam penerapan *good governance* memegang kekuasaan penuh dalam pemerintahan, dengan keterlibatan masyarakat dalam suatu pemerintahan bisa membangun interaksi antara atasan dan bawahan sehingga apa

yang di perlukan oleh masyarakat bisa didengar langsung oleh pemerintah. Sektor swasta bisa menjalin kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah sehingga dalam kerja sama tersebut bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan di suatu daerah. Sehingga ketiga aktor tersebut sangat erat kaitannya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Menurut UNDP dan LAN dalam Tangkisan (2005:115) ada sembilan prinsip-prinsip dalam *good governance* diantaranya yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsifitas, orientasi, keadilan, akuntabilitas, efektifitas, strategi visi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia haruslah bisa menerapkan prinsip tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Keseluruhan prinsip tersebut bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan didukung dengan keaktifan pemerintah, masyarakat serta sektor lain yang bisa mendukung tercapainya sebuah program dari pemerintah. Selain itu, tidak hanya bisa diterapkan pada sektor Pemerintahan Pusat akan tetapi bisa juga diterapkan pada sektor pemerintahan terkecil seperti di Pemerintahan Desa. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut juga harus diimbangi dengan penerapan Undang-Undang Desa sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan yang ada Desa maka kedua unsur tersebut bisa berjalan beriringan untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang baik

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mencapai keberhasilan di tingkat Pemerintahan Desa maka sebuah Desa harus bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta

mengikutsertakan masyarakat dalam mewujudkan suatu tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dana yang digelontorkan melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini juga tidak sedikit sesuai dengan jumlah penduduk dan luas geografis. Oleh sebab itu, kedepannya melalui Undang-Undang ini Pemerintahan Desa mengetahui kelebihan serta potensi yang ada dan bisa memanfaatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut menjadi kekuatan untuk membangun sebuah Desa seperti potensi di bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk masyarakat Indonesia sebagai negara agraris. Bila pemerintah bisa memanfaatkan potensi desa salah satunya dibidang pertanian bukan hal yang tidak mungkin akan menjadi percontohan desa yang berhasil dalam bidang pertanian dan menjadi Desa Mandiri Pangan serta didukung dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian RI Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun 2016, Desa Mandiri Pangan merupakan kemampuan sebuah desa ataupun kelurahan dimana masyarakatnya mulai bisa mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan gizi masyarakat melalui pengembangan potensi yang ada di suatu desa secara berkelanjutan. Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu inovasi program dari Kementerian Pertanian RI yang mulai dirintis pada tahun 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan disuatu pedesaan melalui cara pemberdayaan sumberdaya manusia, serta pemanfaatan potensi alam yang ada. Sasaran penerapan program dari Kementerian Pertanian RI yaitu desa rawan pangan.

Bukan hal yang tidak mungkin jika Indonesia bisa menjalankan program melalui ketahanan pangan di desa karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Dilansir dari *Kompas.com* pada Februari 2015, Badan Pusat Statistika mencatat 31,74% angkatan kerja di Indonesia atau sekitar 38,29 juta bekerja pada sector pertanian. Sebagai Negara agraris, khususnya pada sector pertanian bisa menghasilkan berbagai macam bahan pangan seperti, padi, jagung, kedelai, sayuran-sayuran, ubi, singkong serta cabai untuk memenuhi permintaan pasar impor maupun ekspor. Maka dari itu tidak heran lagi Negara Indonesia bisa menjadi Negara agraris dengan potensi alam yang ada serta didukung oleh sumber daya manusia yang mau bekerja di sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama sehingga bisa mewujudkan Desa Mandiri Pangan.

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang bisa menjadi percontohan Desa Mandiri Pangan yaitu di Kabupaten Bantul. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 pasal 4 menjelaskan bahwa bisa mewujudkan penataan ruang di Kabupaten Bantul yang maju serta mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri, pariwisata-budaya, perdagangan, serta jasa perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan rasio bencana. Dari penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa prioritas utama tata ruang di Kabupaten Bantul yaitu pada sektor pertanian serta didukung dengan kondisi geografis di Kabupaten Bantul sendiri dan bukan hal yang tidak

mungkin di Kabupaten tersebut bisa menjadi percontohan Desa Mandiri Pangan dengan mengutamakan prioritas utama pada sektor pertanian.

Salah satu Desa yang telah menjadi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul yaitu Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bantul tahun 2015 Desa Bangunjiwo merupakan desa terluas se-Kecamatan yang ada di Kecamatan Kasihan berikut ini tabelnya:

Tabel 1. 1 Luas Desa Se-Kecamatan Kasihan

No	Desa	Luas Desa Tahun 2015	Luas Lahan Sawah Tahun 2015	Luas Lahan Bukan Sawah Tahun 2015	Luas Non Pertanian Tahun 2015
1	Bangunjiwo	1.543 Ha	191,55 Ha	82 Ha	1.269,45 Ha
2	Tirtonimolo	513 Ha	144,65 Ha	24 Ha	344,35 Ha
3	Tamantirto	672 Ha	166,25 Ha	32 Ha	473,75 Ha
4	Ngetisharjo	510 Ha	60,65 Ha	17 Ha	432,35 Ha
Luas keseluruhan desa		3.238 Ha	563,1 Ha	155 Ha	2.519,9 Ha

Sumber: Kecamatan Kasihan Dalam Angka 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan Desa Bangunjiwo merupakan Desa terluas diantara Desa yang lainnya yaitu dengan luas wilayah secara keseluruhan 1.543 Ha. Dengan pembagian luas wilayah sebagai berikut: wilayah lahan sawah 191,55 Ha, wilayah bukan sawah 82 Ha, dan wilayah non pertanian 1.269,45 Ha. Dari penjelasan tersebut Desa Bangunjiwo merupakan Desa yang mempunyai luas lahan sawah serta non sawahnya sangat luas dan bukan hal yang tidak mungkin di Desa tersebut bisa mewujudkan ketahanan pangan masyarakatnya pada sektor pertanian.

Pada tahun 2016 di Desa Bangunjiwo berhasil mewakili Kabupaten Bantul pada pelaksanaan lomba Desa Mandiri Pangan tingkat DIY dan berhasil meraih juara II pada tahun 2016. Padahal pada tahun 2012 Desa Bangunjiwo masih berstatus sebagai Desa tahap kedua yaitu tahap persiapan untuk bisa menjadi Desa Mandiri Pangan. Akan tetapi pada tahun 2016 Desa tersebut sudah bisa mewakili Kabupaten Bantul dalam perlombaan Desa Mandiri Pangan tingkat DIY. Keberhasilan Desa Bangunjiwo tidak terlepas dari partisipasi masyarakat langsung serta pendampingan oleh Pemerintahan Desa. Dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan tidaklah terlepas dari tata Pemerintahan yang baik atau *good governance* maupun partisipasi langsung dari masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan diatas tentang sepuluh prinsip *good governance* yang bisa diterapkan dalam mewujudkannya Desa Mandiri Pangan.

Sedangkan dilihat pada tahun 2014 dalam menjalankan program Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo telah terjadi permasalahan yang cukup berarti karena dari pihak Pemerintah Desa dengan kelompok-kelompok Afinitas dan kelompok gapoktan. Permasalahan desa mandiri pangan yaitu terkait pelembagaan dari Pemerintah Desa, dimana pihak LKD tidak dapat berkomunikasi baik dengan kelompok afinitas dan kelompok Gapoktan. Dengan adanya permasalahan tersebut menyebabkan kesalahan komunikasi antara kedua belah pihak yaitu dari pihak LKD dan juga kelompok masyarakat. Kesalahan komunikasi tersebut terjadi antara lain karena dari pihak LKD tidak melakukan pembukuan secara terperinci, baik secara pembukuan anggaran ataupun kegiatan sehingga masyarakat juga tidak mengetahui dana yang telah digunakan. Dampak yang ditimbulkan dari Adanya

permasalahan tersebut adalah, membuat kelompok afinitas dan Kelompok Gapoktan menjadi pasif dikarenakan tidak adanya sistem pembukuan yang jelas yang menyebabkan kelompok afinitas ragu terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh LKD.

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tahun 2015. Mengingat luasnya aspek prinsip-prinsip *good governance* serta keterbatasan penulis untuk memahami keseluruhan prinsip-prinsip tersebut, maka dalam penelitian ini hanya akan meneliti beberapa prinsip *good governance*, yaitu

1. Prinsip partisipasi,
2. Prinsip transparansi,
3. Prinsip efektivitas
4. Prinsip akuntabilitas,
5. Prinsip keadilan.

Prinsip partisipasi dipakai dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan, karena prinsip tersebut bisa dilihat sejauh mana partisipasi masyarakat/pemerintah dalam keterlibatan kegiatan tersebut. Prinsip transparansi sangat penting dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan, karena diharapkan pemerintah bisa lebih bisa terbuka terhadap informasi yang disampaikan oleh atasnya (Pemerintah Daerah) Kepada Pemerintah Desa dan bisa disampaikan oleh masyarakat sehingga ada *check and balance* antara

masyarakat dengan pemerintah. Prinsip transparansi juga akan mampu menciptakan kepercayaan pada pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, sehingga bisa diberikan oleh masyarakat yang membutuhkan. Efektifitas juga bisa dipakai dalam menilai seberapa efektif program tersebut dijalankan sehingga bisa berdampak pada masyarakat. Prinsip akuntabilitas dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Prinsip keadilan digunakan untuk melihat apakah ada ketimpangan gender dalam menjalankan program Desa Mandiri Pangan tersebut. Sehingga dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan bisa diukur melalui kelima prinsip dari *good governance* tersebut yang meliputi partisipasi, transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan.

Pemilihan ke lima prinsip tersebut bukan berarti mengenyampingkan atau dirasa tidak penting dan tidak menarik untuk dibahas, hanya saja prinsip-prinsip tersebut dinilai bisa mengukur keberhasilan Desa Mandiri Pangan. Selain itu peneliti mempunyai alasan teoritis mengapa hanya menggunakan keempat prinsip saja yaitu partisipasi, transparansi, efektivitas, akuntabilitas dan keadilan dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo. Dimulai dari masa orde baru aspirasi masyarakat tidak dibutuhkan dalam pengambilan suatu keputusan, dimana peran pemerintah lebih dominan sehingga masyarakat terkesan hanya bisa menerima suatu keputusan yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan karena ruang gerak masyarakat dibatasi untuk menyampaikan suatu aspirasi kepada pemerintah atau hanya bersifat *top down* saja

Pasca orde baru runtuh secara tidak langsung diganti oleh zaman reformasi yang dianggap lebih demokratis. Pada zaman reformasi aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah sehingga untuk mendapatkan suatu keputusan tidak hanya bersifat *top down* (seperti masa orde baru) akan tetapi lebih bersifat *bottom up*. Maka dari itu ke lima prinsip tersebut bisa menjadi kunci dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan karena sebuah inovasi program akan berhasil jika adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, transparansi, efektivitas serta pertanggungjawaban atas sebuah program. Atas landasan pemikiran tersebut maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *good governance* khususnya partisipasi, transparansi, efektivitas, akuntabilitas dan keadilan dalam mewujudkan desa mandiri pangan di desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah dan penelitian ini adalah **“Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2015”?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan kepada masyarakat dan khususnya pihak Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri Pangan sehingga dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.
2. Memberikan masukan serta evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul tentang penerapan *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan.

D. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan tujuh *literature review* yang berbeda-beda yang akan diklasifikasikan sebagai berikut: yang pertama penelitian tentang evaluasi program aksi Desa mandiri Pangan di Kabupaten Bantul, dengan penelitian tentang hubungan komunikasi intrapersonal tenaga pendamping dengan partisipasi masyarakat petani dalam program Desa Mandiri Pangan (proksi demapan) di kelurahan Pall Merah kota Jambi dan *good governance* Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Pertanian Desa. Ketiga penelitian tersebut mempunyai fokus yang hampir sama karena menyoroti partisipasi masyarakat serta keterlibatan tenaga pendamping atau keterlibatan pemerintah dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan tersebut. Persamaan ketiga penelitian sebelumnya dan peneliti ini ada kesamaan yaitu sama-sama melihat partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemerintah langsung dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan. Akan tetapi juga ada perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan prinsip-prinsip *good governance*.

Yang kedua penelitian tentang studi partisipasi masyarakat pada Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk Kabupaten Bantul, dengan penelitian tentang Analisis Gender Dalam Program Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus: Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kelaten-Jawa Tengah). Dalam dua penelitian tersebut sama-sama melihat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan, akan tetapi tidak membahas bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan

Desa Mandiri Pangan dalam kedua objek tersebut. Sehingga penelitian ini ingin melanjutkan penelitian sebelum-sebelumnya.

Yang ketiga penelitian tentang Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan, dan penelitian tentang Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat (Studi Khusus: Kelurahan Ladang Bambu kecamatan Medan Tuntungan) Kedua penelitian tersebut menjelaskan dampak program Desa Mandiri Pangan bisa memberikan dampak yang positif terbentuknya kelompok afinitas, berkurangnya angka keluarga miskin.

Keempat yaitu penelitian tentang Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Slemen Kabupaten Sleman, Penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dan Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan fisik Desa (studi di Desa Tateli I kecamatan Mandolang). Ketiga penelitian tersebut hamper sama dan membahas tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* hanya saja setiap penelitian yang dilakukan berbeda dalam menggunakan keseluruhan prinsip-prinsip tersebut. penelitian pertama menggunakan prinsip prinsip transparansi, partisipasi, akuntabelitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektif efisien, dan orientasi consensus. Sedangkan penelitian kedua menggunakan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dan penelitian ketiga menggunakan prinsip partisipasi dan transparansi. Sedangkan pada

penelitian ini menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, efektifitas dan akuntabilitas.

Dari keseluruhan *literature review* peneliti yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana peneliti akan memfokuskan penelitian tentang penerapan *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015 sehingga dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada dan ingin melanjutkan penelitian yang sebelum. Berikut ini penjelasan ringkasan dari keseluruhan literature review dari beberapa penelitian:

Tabel 1. 2Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Ringkasan
1	Siti Zuchainah & Aprilianti (2015)	Evaluasi Program aksi Desa mandiri Pangan Di Kabupaten Bantul	Penelitian ini dilaksanakan di dua Desa yang berbeda yaitu desa Muntuk Dlingo dan Desa Selopamioro Imogiri Kabupaten Bantul pada tahun 2009. Pada penelitian ini ingin mengetahui apakah program Desa Mandiri Pangan bisa efektif dilaksanakan di dua desa tersebut dan data menunjukkan Program Desa Mandii Pangan yang dilaksanakan pada dua desa tersebut bisa dikatakan efektif karena telah sesuai dengan rencana program yang telah dilaksanakan pada tingkat desa.

No	Penulis	Judul	Ringkasan
			<p>dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan serta tahap kemandirian. Kelembagaan pangan telah terbentuk berdasarkan hasil partisipasi masyarakat berupa kelompok Afinitas serta bantuan usaha ekonomi produktif bagi anggota Afinitas tersebut. Dari penjelasan singkat diatas maka di Desa Muntuk dan Desa Selopaiona bisa dikatakan efektif sebagai percontohan Desa Mandiri Pangan</p>
2.	Agus Mulyono (2008)	<p>Thesis: Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk Kabupaten Bantul</p>	<p>Adanya program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk diharapkan bisa mengurangi anagka kemiskinan di Desa tersebut. Dalam penelitian ini menekankan pada patisipasi masyarakat di Desa Muntuk yang berpartisipasi langsung dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan baik dari peran serta anggota kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki. Hal tersebut juga bisa dilihat dari adanya kelompok afinitas seperti kelompokbudidaya lele</p>
3	Valeriana Darwis & I Wayan Rusastra (2016)	<p>Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan perbedaan program Desa Mandiri Pangan dan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), kedua program tersebut memang sama-sama untuk</p>

No	Penulis	Jurnal	Ringkasan
			menentaskan kemiskinan di desa dengancara pemfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Diharapkan program desa mandiri pangan bisa mensukseskan program PUAP, dengan cara melanjutkan kegiatan yang ada
4	Khairul Umasa Siregar, dkk (2014)	Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat (Studi Khusus: Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan)	Program Desa Mandiri Pangan yang di laksanakan di kelurahan Ladang Bambu yang memiliki kepala keluarga miskin lebih dari 30% dari total keseluruhan jumlah kepala keluarga dan berhak menerima bantuan dari abdi desa yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dengan bentuk pinjaman dengan bunga rendah melalui kelompok-kelompok afinitas. Dimulai pada tahun 2008 sampai tahun 2016 telah mencapai empat tahap, dimulai dari tahap persiapan pada tahun 2008 hanya ada tiga kelompok sampai dengan tahap kemandirian telah terbentuk 5 kelompok afinitas. Jumlah anggota afinitas mulai meningkat yang semula hanya berjumlah 50 orang dan meningkat menjadi 194 orang anggota kelompok afinitas. Peningkatan jumlah anggota afinitas di kelurahan tersebut bisa dikatakan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan rata kenikan

No	Penulis	Jurnal	Ringkasan
			pendapatan masyarakat sebesar 52% di kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan
5	Siti Nurul Qorih & Titik Sumarti (2008)	Analisis Gender Dalam Program Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus: Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kelaten-Jawa Tengah	Berdasarkan hasil peneliiian masih ada ketimpangan gender dalam melaksanakan pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki. Di desa Jambakan tersebut memiliki 3 kelompok afinitas yang terbagi dalam kelompok tenun, ternak kambing, aneka usaha. Kenapa di desa Jambakan tidak berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam karena di desa tersebut tidak mendukung jika prioritas utama progam pada bidang pertanian, tidak adanya irigasi yang mendukung selain itu iklim yang sangat panas. Dari ketiga Kelompok Afinitas tesebut terjadi ketidakadilan gender yang termanifestasikan berupa beban kerja ganda pada perempuan. Sebelum adanya program dan setelah adanya program desa mandiri pangan belum bisa mengubag pembagiann kerja dalam rumah tangga.
6	Fitriyani, Denny Denmar & Pera Nurfathiyah (2014)	Hubunga Komunikasi Interpersonal Tenaga Pendamping Dengan Pertisipasi Masyarakat Petani Dalam Program Desa Mandiri Pangan (Proksi Demapan)	Hubungan interpersonal merupakan hubungan antara kedua belah pihak baik dari masyarakat petani dan tenaga pendamping yang mempunyai tujuan mendapatkan kepercayaan diri petaani, dan tenaga pendamping yang

No	Penulis	Judul	Ringkasan
			<p>mempunyai tujuan mendapatkan kepercayaan diri petanani, bisa bertukar pikiran langsung kepada tenaga pendamping desa mandiri pangan. diharapkan dengan cara komunikasi interpersonal di Kecamatan Pall Merah tersebut bisa meningkatkan partisipasi petani untuk mesukseskan Desa Mandiri Pangan. Cara yang digunakan dalam komunikasi interpersonal dalam penelitian ini salah satunya yaitu dengan media elektronik seperti telepon genggam, diharapkan dengan media tersebut bisa lebih meningkatkan partisipasi aktif khususnya petani. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi intrapersonal yang dilakukan oleh tenaga pendamping bisa dikatakan efektif karena hubungan terjalin sangat nyata antara partisipasi masyarakat dengan tenaga pendamping.</p>
7	Ending Siti Rahayu (2014)	Hubunga Komunikasi Interpersonal Tenaga Pendamping Dengan Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Program Desa Mandiri Pangan (Proksi Demapan) DiKelurahan Pall Merah Kota Jambi	Pertanian merupakan sektor utama di Indonesia karena Indonesia merupakan negara agraris dan mengingat bahwa dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang bertumpu pada sector pertanian. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pembangunan pertanian yang belum menerapkan

No	Penulis	Judul	Ringkasan
			<p>prinsip-prinsip <i>good governance</i>. Dari keseluruhan prinsip <i>good governance</i> banyak menyoroti gaya kepemimpinan untuk kesejahteraan dan kemandirian pangan. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pemimpin dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sangat menentukan yang memiliki tiga ciri-ciri penting yaitu; Kharisma, Integritas dan keahlian teknis memimpin. Diharapkan kedepannya perlunya rekonstruksi kelembagaan pemerintahan berdasarkan pada <i>good governance</i>, dengan cara tersebut diharapkan kebijakan pada sektor pertanian akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak dan dilakukan secara demokratis.</p>
8	Anas Heriyanto (2015)	Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman	<p>Penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pemerintahan desa Triharjo sudah bisa dikatakan baik, prinsip yang digunakan penelitian tersebut diantaranya prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektif efisien, dan orientasi consensus. Dalam penerapan prinsip tersebut juga ada hambatan dalam melaksanakannya, yaitu Desa dituntut untuk bisa</p>

No	Penulis	Judul	Ringkasan
			<p>merubah pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan permasalahan pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang ada di Desa. Dari kedua hambatan yang ada di Desa Triharjo tersebut Pemerintah desa mempunyai cara untuk mensiasati hambatan tersebut dengan peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan serta pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa</p>
9	Melisa Olivia Mamarimbing (2015)	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Di Desa Tateli I Kecamatan Mandolang	<p>Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran, tingkat pendidikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan rendahnya tingkat ekonomi Desa sedikit terhambat. Penelitian ini menggunkann dua prinsip yaitu partisipasi dan transparansi, akan tetapi kedua prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan sehingga pemerintah kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang dokumen perencanaan kepada masyarakat. Masyarakat Desa Tateli I belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan pembangunan terkait dengan program dana pembangunan</p>

No	Penulis	Judul	Ringkasan
			fisik, hal tersebut disebabkan karena mereka kurang memahami dan mengerti tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan di Desa
10	Fernando Daniel Sorongan (2015)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.	Dalam penelitian ini menggunakan tiga prinsip dari good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabelitas. Transparansi di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yaitu keterbukaan suatu informasi dari pemerintah sehingga dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat setempat. Prinsip partisipasi dalam pengambilan sesuatu keputusan maka pemerintah mengharapkan masyarakat bisa menggunakan hak untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pemerintah dan diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban kinerja.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Good Governance

a. Definisi *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2012:36) kaitannya dengan konsepsi *good governance*, maka secara konseptuan pengertian *good governance* mengandung dua pemahaman: pertama, suatu nilai yang memperioritaskan keinginan/kehendak dari rakyat, nilai yang mengutamakan perkembangan kemampuan rakyatnya dalam mencapai suatu tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial untuk masyarakatnya. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Syakrani dan Syahrani (2009: 121-122) definisi standar konsep *governance* merujuk pada Bank Dunia yang menjelaskan bahwa, *governance as the manner in which power is exercised in management of a country's economic and social resource for development*, atau pada rumusan UNDP: *Governance is defined as the exercise of political, economic & administrative authority to manage a nation's affairs*. Dalam banyak kajian, konsep ini secara operasional pernah juga dijelaskan dengan beberapa istilah lain, seperti *public networks* (Rhoads), *public management* (Hoods), *coordination of sectors of the economy* (Campbell), *public-private partnerships* (Pierre), dan *corporate governance* (Williamson)

Lebih lanjut lagi Dwi Payana dan Eko dalam Syakrani dan Syahriani (2009:122) *governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul good governance (tata pemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata-kelola pemerintahan tak sehat-bed *governance*. *World Conference on Governance* UNDP dalam Sedarmayanti (2007:2) juga mengungkapkan *good governance* merupakan sebuah proses tata pemerintahan yang baik, serta melibatkan *stakeholders*, baik dalam suatu kegiatan perekonomian, sosial politik serta pemamfaatan berbagai sumber daya yang tersedia yang meliputi sumberdaya alam, keuangan, manusia bagi kepentingan rakyatnya yang diselenggarakan dengan tetap memperhatikan asas: keadilan, persamaan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas

Menurut Aminah dalam thesis Muhaidin (2016:25) *good governance* merupakan segala proses maupun bentuk pengelolaan tugas pemerintahan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia disuatu daerah untuk mewujudkan kepentingan bersama serta melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan suatu kebijakan dan dapat menjunjung tinggi atas keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam prinsip *good governance* mempunyai delapan karakteristik meliputi, partisipatif, punya orientasi, akuntabilitas, transparansi, responsive, efektif, adil, dan consensus yang inklusif, serta dapat mengikuti aturan hkum yang ada.

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Dalam menyelenggarakan tata-kelola pemerintahan yang baik maka harus bisa menerapkan *good governance* serta prinsip-prinsipnya dalam menjalankan pemerintahan disuatu daerah maupun desa, berikut prinsip-prinsip menurut beberapa ahli: Menurut Sedarmayanti (2012:38) dalam *good governance* terdapat empat prinsip yang dapat memberikan gambaran tentang pemerintahan yang bai yaitu:

- a. Akuntabilitas, merupakan keewajiban bagi aparat pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b. Transparansi, pemerintahan yang baik akan lebih bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah
- c. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi semua masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritikan terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
- d. Aturan hukum, adanya suatu jaminan kepastian hukum dan adil kepada masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Menurut UNDP dan LAN dalam Tangkilisan (2005:115) menjelaskan bahwa ada sembilan prinsip dalam penerapan *good governance* yaitu:

- a. Partisipasi (*participation*)

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan aspirasi langsung maupun tidak langsung kepada

pemerintahan untuk mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Penerapan Hukum (*Fairness*)

Dalam penerapan suatu kebijakan harus adil, yanpa membeda-bedakan status sosial, serta dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum terhadap kesamaan hak.

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi ibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi harus dapat dipahami dan dapat dimnitor.

d. Responsifitas (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

e. Orientasi (*Consensus Orientation*)

Good governance menjadi perauran kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Keadilan (*Equality*)

Semua warga negara tanpa membeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untukmeniingkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. Efektifitas (*Effectiveness*)

Proses-proses dalam lembaga-lembaga menghasilkan sesuatu dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan atau eksternal organisasi.

i. Strategi Visi (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pembangunan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Pada penjelasan prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta kontrol dari masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan agar bisa menciptakan tujuan yang diinginkan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam *good governance* karena jika pemerintah membuat kebijakan dan masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya maka kedudukan pemerintah sangat mendominasi

sedangkan masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk meyalurkan aspirasinya kepada pemerintah.

Fokus dalam penelitian ini hanya menggunakan dua prinsip dari keseluruhan prinsip-prinsip *good governance*, prinsip yang digunakan yaitu transparansi, partisipasi, efektivitas dan akuntabilitas. Pangambilan ke-empat prinsip tersebut bukan berarti mengesampingkan prinsip-prinsip yang lainnya karena ke-empat prinsip tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam mewujudkan keberhasilan Desa Mandiri Pangan di Bangunjiwo. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas digunakan dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan diharapkan bisa menjadi contoh Desa disekitarnya. Berikut ini indikator untuk mengukur keberhasilan prinsip-prinsip *good governance*:

Menurut Sedarmayanti (2012:16-17) terdapat tiga indikator untuk mengukur prinsip partisipasi:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan berupa kritik dan saran.

Sedangkan indikator untuk mengukur prinsip transparansi yaitu sebagai berikut:

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Cappel J.P dalam Mutiarin (2014:16) ada beberapa indikator untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, program dan kegiatan berikut ini indikatornya:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Menurut Manggaukang dalam skripsi Nurul Mukhilda (2013:52) ada beberapa indikator untuk mengukur akuntabilitas program berikut ini indikatornya:

1. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

Menurut Sedarmayanti (2012:17-18) terdapat dua indikator untuk mengukur prinsip keadilan berikut ini indikatornya:

1. Meningkatkan kesejahteraan gender
2. Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender

Menurut Dwipayana (2003: 134) terdapat lima misi dari *good governance* dalam perekonomian desa meliputi:

- a. Terwujudnya pemerintahan desa yang mengemban visi, misi kebijakan program pengembangan ekonomi kerakyatan
- b. Terwujudnya partisipasi masyarakat ekonomi, khususnya terutama yang berada pada lapisan bawah terhadap jalannya pemerintahan sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan perekonomian desa yang mengemban aspirasinya.
- c. Terwujudnya suatu instansi ekonomi yang memberikan akses bagi lapisan bawah untuk ikut memasuki pasar
- d. Hilangnya berbagai kelembagaan yang memperparah akses bagi masyarakat ekonomi khususnya lapisan bawah dalam pengembangan ekonomi.

- e. Munculnya modal sosial masyarakat laisan bawah sehingga mempunyai bargaining position yang kuat dalam berhadapan dengan kekuatan dari negara dan pasar.

c. Pilar *Good Governance*

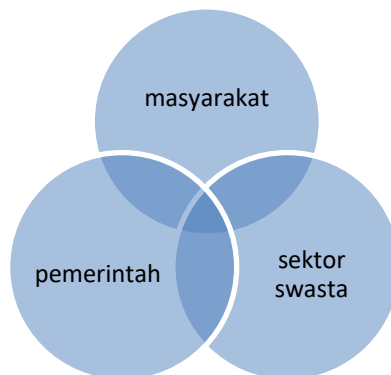
Menurut Sedarmayanti (2012:39) dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik haruslah melibatkan 3 pilar dalam menjalankan suatu pemerintahan:

- a. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan negara, yang melibatkan sector swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar.
- c. Masyarakat madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada diantara pemerintah dan perorangan, yang mencakup baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial politik dan ekonomi.

Selain berpegang teguh pada prinsip-prinsip dari *good governance* suatu pemerintahan harus melibatkan tiga pilar yang ada didalamnya sehingga bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan sehat. Tiga pilar tersebut terdiri dari negara/pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani. Pertama negara/pemerintah, dalam menjalankan tugas serta kewajibannya

pemerintah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan dan bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Kedua sektor swasta, langsung berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Ketiga masyarakat madani, berperan penuh dalam proses pembuatan suatu kebijakan serta masyarakat sebagai penengah antara pemerintah dan sektor swasta.

Gambar 1. 1 Hubungan Antara Sektor



2. Sistem Pemerintahan Desa

Menurut Djaenuri (2008:1.5) desa merupakan satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi hanya dari satu empat kediaman masyarakat sata ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagaian dari pada masyarakat hukum yang terpisah serta merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan penduduk, ampeana,

kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar.

Sedangkan menurut Arifin (2011:27) ada beberapa definisi desa menurut sudut pandangnya yang pertama desa menurut kajian psikologis sosial merupakan suatu daerah dimana pergaulan atau interaksi sosial ditandai oleh derajat keintiman yang tinggi. Kedua desa dari prespektif ekonomi atau mata pencaharian hidup merupakan daerah yang basis mata pencaharian hidupnya berpusat pada pertanian. Ketiga desa dari perspektif sosial budaya, merupakan daerah yang mempunyai dua sisipola budaya yang berbasis *gemeinsvhaft* dan sisi lain mulai ‘mengenal’ dengan pola budaya berbasis *gesseleschaft*, sehingga terjadinya cultur sering tidak terhindari. Dari ketiga pengertian desa diatas bisa menarik kesimpulan bahwa desa merupakan suatu daerah terkecil yang mempunyai karakteristik masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Menurut Bournen dalam (Hanif 2017:11) desa adalah suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak berapa ribu orang, hamper semua saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak lam, serta dalam tempat tinggal tu terdapat ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan keidah-kaidah sosial.

Menurut Roucek & Warren dalam Arifin (2011:28) mengemukakan beberapa karakteristik atau ciri-ciri kehidupan masyarakat desa yaitu;

- a. Masyarakat desa lebih bersifat homogen dalam segi mata pencaharian hidupnya, tradisi kepercayaan atau pandangan hidup.
- b. Kehidupan masyarakat desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas berbagai aspek kehidupan pedesaan.
- d. Hubungan antar warga desa relatif intim, saling mengenal satu sama lain.

Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Dahan and Bhatnagar dalam Arifin (2011: 32) menjelaskan karakteristik kehidupan masyarakat pedesaan sebagai berikut:

- a. Kehidupannya yang menyatu dengan alam sekitarnya
- b. Mata pencahariannya utama sebagai petani yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada
- c. Komonitas dalam kampong lebih kecil bila dibandingkan dengan komnitas kota
- d. Masyarakatnya bersifat homogen dan stratifikasi sosialnya lebih banyak ditentukan oleh kepemilikan tanah pertanian
- e. Interaksi sosial bersifat langsung dan mobilitas sosial relative kurang bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.
- f. Solidaritas sosial lebih kuat dengan masyarakat setempat, ras kebersamaan dalam beragama aktivitas nampak kuat.

Menurut Djaenuri (2008: 2.4) untuk menjalankan Pemerintahan Desa yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya, kewenangan desa tersebut meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan Daerah atau Pusat
- c. Tugas pembantu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Profinsi dan Pemerintah Kabupaten

Selain itu menurut Djaenuri (2008:4.7) juga menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Pemerintahan desa, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
- b. Pelaksanaan tugas dalam bidang pembangunan serta pembinaan masyarakat
- c. Pembinaan perekonomian Desa
- d. Pelaksanaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Pelaksanaan musyawarah desa
- g. Penyusunan, pengajuan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

3. Ketahanan Pangan

Ketersediaan sumber pangan dengan jumlah yang memadai untuk kebutuhan masyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyimpanan pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman. Sedangkan menurut Suharjo dalam Afrianto (2010:29) pangan merupakan suatu bahan makanan yang bisa dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, pangan yang dimaksud disini ada dua bagian pertama pangan pokok, merupakan bahan pangan yang dimakan secara teratur bagi sekelompok penduduk dalam jumlah yang cukup besar, untuk menghasilkan sebagian besar sumber energi. Kedua pangan dikonsumsi manusia untuk mendapatkan energy yang berupa tenaga untuk melakukan aktifitas hidup.

Terpenuhinya sumber pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik dari segi mutu, kualitas, merata dan terjangkau oleh seluruh rumah tangga merupakan sasaran dari pembangunan ekonomi di setiap negara khususnya Indonesia. Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 1 ayat 17 menjelaskan ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi semua masyarakat atau rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan

yang mencukupi, baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata untuk semua lapisan masyarakat, dan terjangkau. Untuk mewujudkan ketahanan pangan disuatu daerah yang bersangkutan haruslah ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut lagi menurut Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2002, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Menurut FAO dalam Afrianto (2010:30) ketahanan pangan sebagai situasi dimana dalam segala waktu memiliki kecukupan dari segi jumlah ketersediaan pangan yang aman serta mempunyai gizi yang cukup demi memenuhi kehidupan yang sehat dan aktif. Sedangkan menurut Sitanggan & Marbun dalam Afrianto (2010:30) ketahanan pangan adalah adanya jaminan bahwa kebutuhan pangan dan gizi setiap masyarakat adalah sebagai syarat utama dalam mencapai derajat kesehatan serta kesejahteraan yang tercukupi.

Setelah berhasil mewujudkan kemandirian pangan di desa maka suatu desa bisa mewujudkan ketahanan pangan Menurut Keputusan Menteri Pertanian RI No 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2016, ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta berkelanjutan.

Menurut Maxwell dalam Winarno (2014:301) setidaknya terdapat empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security*) di level keluarga sebagai berikut:

- a. Kucukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat
- b. Akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (*entitlements*) untuk memproduksi, membeli atau menukarkan (*exchange*) pangan ataupun menerima sebagai pemberi (*transfer*)
- c. Ketahanan pangan ang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentaan, resiko dan jaminan pengaman sosial.
- d. Fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis/kritis, transisi, dan siklus.

4. Desa Mandiri Pangan

Menurut Qariah & Sumarti (2008:4) program Desa Mandiri Pangan merupakan suatu program yang dibuat oleh Departemen Pertanian yang mempunyai tujuan untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan serta kemiskinan di sebuah Desa. Melalui program ini diharapkan masyarakat yang ada di desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalankan hidup yang sehat serta produktif setiap harinya.

Upaya dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan ini melalui pemberdayaan masyarakat untuk lebih peka dengan potensi alam sekitar dan kemampuannya, mencari alternative peluang serta pemecahan suatu permasalahan dan mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan akhirnya mencapai kemandirian.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pertanian RI No 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2016, Desa Mandiri Pangan adalah suatu Desa/Kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya , setempat secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut Desa Mandiri Pangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan drajat masyarakat desa melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia di suatu Desa. Masyarakat Desa dituntut untuk mengetahui potensi yang ada sehingga bisa memanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Lebih lanjut lagi Qariah & Sumarti (2008:4-5) tujuan dari Desa Mandiri Pangan yaitu diharapkan masyarakat lebih berartipiasi dalam suatu rangkaian kegiatan terutama kelompok masyarakat miskin rawan pangan sehingga bisa memperbaiki kehidupannya, dengan cara pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan budaya local yang ada. Tidak hanya partisipasi dari masyarakat saja dari pihak pemerintah pun bisa menyediakan fasilitas yang

digunakan. Sehingga diharapkan dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan yang dibuat oleh Departemen Pertanian bisa mengurangi jumlah penduduk atau rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan gizi yang ada akan di desa menurun.

Dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan harus melaksanakan beberapa komponen. Diakses dari *bkp.tanjabtimkab.go.id* terdapat komponen kegiatan yang dilakukan oleh Desa Mandiri Pangan melalui pendekatan: pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan didukung oleh sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah Dewan ketahanan Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dari tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan pembinaan pada desa-desa pelaksana. Perencanaan di tingkat desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Tim Pangan Desa (TPD), penyuluhan, kelompok kerja kabupaten dan pendampingan sebagai fasilitator, serta Lembaga Pembangunan Desa (LPD), kepala desa dan kaur pembangunan, aparat serta tokoh masyarakat. Dalam mewujudkan desa mandiri pangan harus melewati empat tahapan yang meliputi; tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan yang terakhir kemandirian.

Untuk tercapainya tujuan program Desa Mandiri Pangan dirancang dalam kurun waktu 4 tahun, melalui empat tahapan yaitu:

- a. Tahap persiapan, meliputi seleksi desa rawan pangan dan pembentukan kelompok KK miskin/kelompok afinitas;
- b. Tahap penumbuhan, mulai adanya usaha produktif, pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD), berfungsinya posyandu dan bekerjanya

sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana wilayah perdesaan;

- c. Tahap pengembangan, adanya perkembangan ekonomi produktif melalui kelompok afinitas, peningkatan modal LKD, pengembangan sistem ketahanan pangan;
- d. Tahap kemandirian, adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif, adanya jaringan kemitraan, berfungsinya LKD sebagai layanan modal dan berfungsinya Tim Pangan Desa dalam mengkoordinasikan program lintas sektoral menurut Darwid & Rusastra (2016:4)

F. Definisi Konseptual

Konsep merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti serta didalamnya yang meliputi keadaan suatu kelompok ataupun individu yang akan menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Good governance* adalah suatu tata pemerintahan yang baik dan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, penerapan hukum, transparansi dari pemerintahan, responsifitas, orientasi keadilan, efektifitas, akuntabilitas dan strategi visi serta bisa melibatkan langsung antara

pemerintah, masyarakat, sektor swasta untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai

- b. Desa adalah suatu tata pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa, dimana memiliki ciri-ciri mayoritasnya penduduknya sebagai petani, dan masyarakatnya bersifat homogen.
- c. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi semua masyarakat di suatu wilayah yang tercukupi dari segi jumlah yang merata, mutu yang berkualitas serta bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- d. Desa Mandiri Pangan adalah suatu Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber alam yang ada, dalam mewujudkan desa mandiri pangan ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh sebuah Desa Mandiri Pangan yaitu, tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan yang terakhir kemandirian.

G. Definisi Operasional

Dari prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi masyarakat, penerapan hukum, transparansi dari pemerintahan, responsifitas, orientasi keadilan, efektivitas, akuntabilitas dan strategi visi. Sementara dalam penelitian ini hanya menggunakan dua prinsip yaitu partisipasi dan transparansi. Pengambilan empat prinsip partisipasi, transparansi, peraturan hukum, akuntabilitas. Berikut gambaran definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Prinsip *Good Governance*

a. Partisipasi

- 1). Keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan
- 2). Keterlibatan aparat Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan.

b. Transparansi

- 1). Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan
- 2). Akses informasi yang akuntabel dan tepat waktu dari pemerintah kepada masyarakat

c. Efektifitas

- 1). Hasil yang sesuai dengan tujuan utama
- 2). Keberhasilan program

d. Akuntabilitas

- 1). Mempertanggungjawabkan kegiatan Desa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan
- 2). Memberikan hasil yang optimal

e. Keadilan

- 1) Adanya kesetaraan gender

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014:13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif biasa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena secara historik dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi ke dalam variable atau hipotesis, akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Lokasi Penelitian atau Unit Analisis

Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena di Desa Bangunjiwo cukup berhasil menjadi Desa ,Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul serta mewakili dalam lomba tingkat DIY dan meraih juara ke-2. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *good governance* khususnya yaitu partisipasi, transparansi, peraturan hukum dan akuntabilitas, dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan pada tahun 2015.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian mengenai penrapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Baangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2015, pihak yang akan dijadikan sumber data yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Seksi Kesejahteraan, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Bangunjiwo. Dalam memperoleh data yang lebih akurat, sumber data bisa dibagi lagi dengan beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Rahmawati Dian E (2014:30) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari unit analisis data yang akan dijadikan objek penelitian. Data ini bisa dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan objek yang dibutuhkan menjadi narasumber sehingga dapat mendapatkan suatu informasi yang bisa menunjang atau bisa berhubungan dengan apa yang sedang diteliti. Data primer ini juga bisa berupa diperoleh dari narasumber yang akan di wawancarai baik secara individu ataupun kelompok.

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan penerapan *good governance* khususnya prinsip partisipasi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas, dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada

tahun 2015, yang diperoleh langsung dari unit analisis yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek yaitu Kepala Desa Bangunjiwo, Kepala Seksi Kesejahteraan, Perwakilan Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Menurut Rahmawati Dian E (2014:30) data sekunder adalah data yang bisa diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen resmi yang mencatat keadaan yang terjadidalam suatu objek penelitian. data sekunder juga bisa berupa majalah, hasil-hasil studi, tesis, maupun hasil survey dari berbagai instansi pemerintahan maupun tidak. Peneliti menggunakan data sekunder karena untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan aparat Pemerintahan Desa maupun tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang mempunyai maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan atau bisa disebut juga (*interviewer*) dan terwawancara yaitu sebagai yang memberikan suatu

jawaban yang relevan dan dirasa tau mengenai suatu informasi tertentu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (*interviewee*) menurut Moleong (2004:186). Jadi wawancara itu mempunyai tujuan untuk mengali suatu informasi yang dimiliki oleh *interviewer* untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewee*.

Sedangkan dalam melakukan wawancara ada dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan oleh interviewee kepada interviewer yang sudah tersusun sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan wawancara tidak terstruktur adalah pertanyaan yang tidak menggunakan daftar pertanyaan (sepontan) akan tetapi hanya berdasarkan pedoman pertanyaan yang dibuat secara garis besar saja.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai penerapan prinsip *good governance* khususnya partisipasi, transparansi, peraturan hukum, dan akuntabilitas dalam mewujudkan desa mandiri pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016, peneliti akan mewawancarai Kepala Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Dusun, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Bangunjiwo.

b. Dokumentasi

Menurut Rahmawati Dian E (2014:33) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan macam-

macam dokumen atau catatan yang bisa menjelaskan keadaan konsep yang sedang diteliti, didalam unit analisis yang selanjutnya akan dijadikan menjadi objek penelitian. Dokumentasi tersebut bisa berupa dokumen resmi, arsip, berita dari media massa cetak, jurnal serta biografi. Dokumentasi ini dianggap cocok untuk penelitian ini karena sebelum terjun ke lapangan langsung peneliti hanya mendapatkan sebagian besar informasi-informasi yang relevan dari berbentuk dokumen-dokumen resmi untuk mendapatkan suatu informasi mengenai subjek penelitian.

c. Observasi

Menurut Rahmawati Dian Eka (2014: 31) observasi adalah cara pengumpulan data mengenai konsep penelitian di dalam unit analisis penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung. Jadi observasi tersebut cara memperoleh data dengan melihat langsung terhadap objek penelitian guna untuk mendapatkan suatu gambaran penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:246-252) adapun model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir, dimana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila jawaban yang didapat dari narasumber kurang setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan suatu informasi

yang dianggap kredibel. Dalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus sehingga bisa mendapatkan sebuah data yang diinginkan.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan yaitu merangkum, memilah hal-hal yang dianggap penting, memfokuskan pada suatu tujuan, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambarannya yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dan mencirikan bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang sedang difahami tersebut.

c. Verification (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah seiring waktu bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan awal didukung dengan data yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun Susunan sistematika penulisan yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Deskripsi Objek Penelitian: pada bab ini akan membahas mengenai profil desa mandiri pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015, seperti profil Desa Bangunjiwo, struktur organisasi, dan visi misi Desa.

BAB III Pembahasan: dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian dan analisis data mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan desa mandiri pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015.

BAB IV Penutup: dalam bab ini terdiri dari dua komponen yaitu kesimpulan dan saran, mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan

Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
tahun 2015.